



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
A. Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Presiden.....	1
1. Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana.....	1
a. Biro Umum	1
1) Standar Pelayanan Perencanaan Bangunan di Lingkungan Sekretariat Presiden	1
2) Standar Pelayanan Perawatan dan Pemeliharaan Bangunan dan Utilisasinya di Lingkungan Sekretariat Presiden, Kediaman Presiden, dan Rumah Dinas Kepala Sekretariat Presiden.....	21
3) Standar Pelayanan Penatausahaan Bangunan di Lingkungan Sekretariat Presiden	35
4) Standar Pelayanan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Presiden.....	44
5) Standar Pelayanan Penyiapan Kendaraan bagi Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, Tamu Penting Lainnya, dan Seluruh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Sekretariat Presiden	52
6) Standar Pelayanan Pemberian Izin Kerja di Lingkungan Sekretariat Presiden	64
7) Standar Pelayanan Pemeriksaan dan Penyidikan Kejadian Perkara di Lingkungan Sekretariat Presiden.....	71
b. Biro Pengelolaan Istana	78
1) Standar Pelayanan Kegiatan Pelayanan Kerumahtanggaan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, serta Kegiatan Penting Lainnya.....	78
2) Standar Pelayanan Penataan/ <i>Display</i> Benda-Benda Seni Koleksi Sekretariat Presiden	88
3) Standar Pelayanan Pagelaran Kesenian pada Acara Jamuan Kenegaraan bagi Tamu Negara	94
4) Standar Pelayanan Perawatan Benda-Benda Seni Bahan Logam Koleksi Sekretariat Presiden	100



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

5) Standar Pelayanan Penyiapan Dekorasi Rangkaian Bunga Dalam Rangka Acara Kunjungan Tamu Negara di Istana Kepresidenan Jakarta.....	108
6) Standar Pelayanan Pemberian Izin Kunjungan Masyarakat ke Istana-istana Kepresidenan di Daerah	114
7) Standar Pelayanan Penataan Peralatan Rumah Tangga dan Linen di Lingkungan Sekretariat Presiden.....	120
8) Standar Pelayanan Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan di Lingkungan Sekretariat Presiden.....	127
9) Standar Pelayanan Penataan Peralatan Upacara untuk Kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, dan Kegiatan Penting Lainnya.....	134
2. Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Protokol, Pers, Media, dan Informasi.....	140
a. Biro Protokol.....	140
1) Standar Pelayanan Penyiapan Kunjungan Kerja Presiden dan Istri/Suami Presiden ke Daerah.....	140
2) Standar Pelayanan Penyiapan Kunjungan Kerja Presiden dan Istri/Suami Presiden ke Luar Negeri.....	151
3) Standar Pelayanan Penyiapan Acara Harian Presiden dan Istri/Suami Presiden.....	163
4) Standar Pelayanan Penyiapan dan Pendistribusian Undangan Acara yang Dipimpin/Dihadiri oleh Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden	169
b. Biro Pers, Media, dan Informasi	174
1) Standar Pelayanan Pendokumentasian Naskah, Foto, dan Audio Visual Kegiatan Presiden, dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, dan Kegiatan Penting Lainnya di Lingkungan Sekretariat Presiden	174
2) Standar Pelayanan Peliputan Kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, serta Kegiatan Penting Lainnya	181
3) Standar Pelayanan Perizinan Pas Media Kepresidenan bagi Wartawan.....	189
4) Standar Pelayanan Pengumpulan dan Pemantauan Berita Media Cetak Nasional (<i>Summary of Daily Media Report</i>).....	195
5) Standar Pelayanan Pemantauan dan Analisis Berita di Lingkungan Sekretariat Presiden	202



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

6) Standar Pelayanan Pengelolaan Sistem Informasi Kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, dan Kegiatan Penting Lainnya.....	208
B. Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden	215
1. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik	215
a. Asisten Deputi Hubungan Internasional	215
Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Hubungan Internasional	215
b. Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri	223
Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri	223
c. Asisten Deputi Hukum dan Hak Asasi Manusia	231
Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	231
d. Asisten Deputi Komunikasi Politik.....	239
Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Komunikasi Politik	239
e. Asisten Deputi Dokumentasi dan Diseminasi Informasi	247
1) Standar Pelayanan Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara, Tamu Asing, dan Kegiatan Kesekretariatan di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden	247
2) Standar Pelayanan Diseminasi Informasi Kegiatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara, Tamu Asing, dan Kegiatan Kesekretariatan di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden Melalui Media Umum dan <i>Website</i> serta Hasil Analisis Berita Kliping Media Cetak dan Media Elektronik/ <i>Online</i>	262
2. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Ekonomi.....	274
a. Asisten Deputi Program Ekonomi Khusus	274
Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi, Logistik Nasional, Restrukturisasi BUMN, dan Industri Kreatif	274



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

b. Asisten Deputi Perdagangan dan Pariwisata.....	282
Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Perdagangan dan Pariwisata serta Penyerapan Pandangan Publik	282
c. Asisten Deputi Industri dan Sumber Daya Alam	291
Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanian, Kelautan, Industri serta Kehutanan dan Perubahan Iklim.....	291
d. Asisten Deputi Infrastruktur dan Energi.....	299
Standar Pelayanan Pengamatan Perkembangan Kebijakan Pemerintah di Bidang Infrastruktur dan Energi.....	299
3. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan.....	308
a. Asisten Deputi Kesejahteraan Rakyat Berbasis Keluarga	308
Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Agama, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kesehatan dan Perlindungan Sosial, dan Penanggulangan Kemiskinan.....	308
b. Asisten Deputi Kesejahteraan Rakyat Berbasis Komunitas	316
Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Bencana, Pemukiman, dan Perumahan.....	316
c. Asisten Deputi Kesejahteraan Rakyat Berbasis Usaha	325
Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Ketenagakerjaan, Peningkatan Akses Sumber Daya Usaha Mikro dan Kecil, dan Peningkatan Kredit Usaha Rakyat.....	325
4. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Tata Kelola Pemerintahan.....	133
a. Asisten Deputi Reformasi Birokrasi.....	133
Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Reformasi Birokrasi	133



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

b. Asisten Deputi Pengawasan Intern Pemerintah	341
Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah	341
c. Asisten Deputi Pelayanan Publik	349
Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Publik .	349
5. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Administrasi.....	357
a. Biro Perencanaan dan Keuangan.....	357
1) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Perencanaan Program dan Anggaran pada Bagian Anggaran 007.04 (Sekretariat Wakil Presiden).....	357
2) Standar Pelayanan Pelaksanaan Revisi Anggaran Bagian Anggaran 007.04 (Sekretariat Wakil Presiden).....	369
3) Standar Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Anggaran Bagian Anggaran 007.04 (Sekretariat Wakil Presiden).....	376
4) Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Pembayaran Langsung (LS), di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden	383
b. Biro Tata Usaha dan Kepegawaian	391
1) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden	391
2) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.....	399
c. Biro Protokol dan Kerumahtangaan	407
1) Standar Pelayanan Penyiapan Acara Harian Wakil Presiden dan Acara Harian Istri/Suami Wakil Presiden	407
2) Standar Pelayanan Penyiapan Acara Kunjungan Kerja Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke Daerah	414
3) Standar Pelayanan Penyiapan Acara Kunjungan Kerja Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke Luar Negeri	423
4) Standar Pelayanan Penyiapan Sidang/Rapat yang Dipimpin oleh Wakil Presiden	431
5) Standar Pelayanan Pengelolaan Notulen Audiensi, Rapat, dan Kunjungan Kerja Wakil Presiden.....	439



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

6) Standar Pelayanan Pengelolaan Naskah Pidato Wakil Presiden.....	449
7) Standar Pelayanan Penyiapan Perjalanan Kunjungan Kerja Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden di Dalam Negeri.....	456
8) Standar Pelayanan Penyiapan Perjalanan Kunjungan Kerja Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke Luar Negeri	463
9) Standar Pelayanan Penyiapan dan Pengadaan Suvenir (Cinderamata) untuk Acara Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden.....	470
10) Standar Pelayanan Penyediaan Jamuan, Dekorasi, Natura serta Peralatan Rumah Tangga, dan Perawatan Linen Untuk Acara Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara serta Kegiatan Lainnya di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden	476
d. Biro Umum	483
1) Standar Pelayanan Perawatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden	483
2) Standar Pelayanan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Sekretariat, Istana, Kantor dan Kediaman Resmi Wakil Presiden.....	490
3) Standar Pelayanan Pengembangan Bangunan/Gedung di Lingkungan Sekretariat, Istana, Kantor dan Kediaman Resmi Wakil Presiden.....	497
4) Standar Pelayanan Penyiapan Kendaraan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara, Tamu Penting Lainnya, dan Bagi Seluruh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden	503
5) Standar Pelayanan Ketertiban dan Keamanan Dalam di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden	513
6) Standar Pelayanan Peminjaman dan Pengembalian Bahan Pustaka di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden	519
C. Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Militer Presiden	528
1. Biro Personel TNI dan Polri	528
a. Standar Pelayanan Administrasi Penerbitan Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat Golongan Pati/Pamen TNI dan Polri ..	528



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

b.	Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Panglima TNI, Kapolri, dan Staf Angkatan	529
c.	Standar Pelayanan Administrasi Penerbitan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Pertama Perwira TNI dan Polri.....	540
d.	Standar Pelayanan Administrasi Penerbitan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Keprajuritan TNI dan Polri	548
e.	Standar Pelayanan Administrasi Penerbitan Keputusan Presiden tentang Dipertahankan Dalam Dinas Aktif Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	556
f.	Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Penugasan Personel TNI/Polri Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet	564
2.	Biro Pengamanan	572
a.	Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluarganya di Dalam Negeri	572
b.	Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluarganya ke Luar Negeri	581
c.	Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pengamanan Kunjungan Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing.....	589
d.	Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pengamanan Sandi dan Elektronika terhadap Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluarganya di Dalam Negeri	598
e.	Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyiapan Sarana Angkutan Kunjungan Presiden, Wakil Presiden Beserta Keluarganya, serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan Negara Asing.....	607
f.	Standar Pelayanan Pengumpulan dan Pengolahan Data Intelijen dalam Mendukung Kegiatan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan	616
3.	Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	624
	Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.....	624



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

D. Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	641
1. Biro Perencanaan	641
a. Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara	641
b. Standar Pelayanan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan di Lingkungan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara dan Deputi Kementerian Sekretariat Negara	651
c. Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Renja Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara)	663
d. Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara).....	674
e. Standar Pelayanan Penyusunan Revisi Anggaran Bagian Anggaran 007.01 (Sekretariat Negara).....	688
f. Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Permohonan ABT/Anggaran Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara)	699
g. Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Laporan Triwulanan Kementerian Sekretariat Negara.....	710
h. Standar Pelayanan Koordinasi Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara)	717
i. Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pada Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara)	725
j. Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Rancangan SBK pada Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara)	736
k. Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU) pada Kementerian Sekretariat Negara	745
l. Standar Pelayanan Penyusunan Proposal Target dan Pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara).....	754
m. Standar Pelayanan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Pemerintah yang Bersumber dari Anggaran Belanja Satuan Kerja Sekretariat Negara	763
n. Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Bahan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Kementerian Sekretariat Negara dengan Komisi terkait di DPR	775



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

2. Biro Keuangan	784
a. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung Non Belanja Pegawai Satuan Kerja Sekretariat Negara.....	784
b. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Penggantian Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan pada Satuan Kerja Sekretariat Negara	795
c. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Lembaga Lain yang Anggarannya Secara Administratif Dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	806
d. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung Non Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Sekretariat Negara Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA.999.08) dan Lembaga Lain yang Anggarannya Secara Administratif Dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara.....	816
e. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Penggantian Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan pada Satuan Kerja Sekretariat Negara Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA.999.08) dan Lembaga Lain yang Anggarannya Secara Administratif Dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	828
f. Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan <i>Audited</i> Kementerian Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007 dan 999 ..	841
g. Standar Pelayanan Pembinaan dan Monitoring Penyusunan laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	853
h. Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan <i>Unaudited</i> Sekretariat Negara BA 007.01 dan 999.08.....	860
i. Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan <i>Unaudited</i> Sekretariat Negara BA 007.01.403013 dan 999.08.979001.....	871
j. Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan <i>Unaudited</i> Kementerian Sekretariat Negara BA 007 dan 999	883
k. Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Perkembangan dan Analisis Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Sekretariat Negara.....	895
l. Standar Pelayanan Penanganan Administrasi, Pengujian, dan Pembayaran Belanja Pegawai Satuan Kerja Sekretariat Negara ..	903
m. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri pada Satuan Kerja Sekretariat Negara	929



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

n.	Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Pejabat Perbendaharaan Negara pada Satuan Kerja di Lingkungan Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara) dan Bagian Anggaran 999.....	937
o.	Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Pengelola Keuangan, Pejabat/Panitia Pengadaan, dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Satuan Kerja di Lingkungan Bagian Anggaran 007.01 dan Bagian Anggaran 999 Bagian Anggaran Pelaksana 007.01	946
p.	Standar Pelayanan Pembayaran Tagihan oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Negara	955
3.	Biro Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat	966
a.	Standar Pelayanan Pengurusan dan Pengendalian Surat Masuk di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	966
b.	Standar Pelayanan Pengurusan dan Pengendalian Surat Keluar di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	974
c.	Standar Pelayanan Reproduksi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	981
d.	Standar Pelayanan Peminjaman Arsip di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	990
e.	Standar Pelayanan Pemindahan Arsip Inaktif di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	996
f.	Standar Pelayanan Pengkoordinasian Administrasi Kegiatan Keprotokolan Menteri Sekretaris Negara.....	1004
g.	Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pelaksanaan Pelayanan Kepada Pimpinan.....	1012
h.	Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pengumpulan dan Penyiapan Bahan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	1019
i.	Standar Pelayanan Pengurusan dan Pengendalian Memorandum di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	1026
j.	Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari-Hari Besar Nasional di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	1034
k.	Standar Pelayanan Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan-Kegiatan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	1042
l.	Standar Pelayanan Penerimaan dan Pengaturan Kunjungan Delegasi Masyarakat ke Kementerian Sekretariat Negara.....	1049
m.	Standar Pelayanan Analisis dan Pelaporan Berita-Berita Media Massa Cetak dan <i>Online</i> yang Berkaitan Dengan Kementerian Sekretariat Negara	1059



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

n. Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik kepada Masyarakat yang Berkaitan Dengan Kementerian Sekretariat Negara.....	1066
4. Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri.....	1076
a. Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Penugasan Tenaga Asing Dalam Kerangka Kerja Sama Teknik Luar Negeri ..	1076
b. Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pemberian Fasilitas Kerja Sama Teknik Bidang Keimigrasian Kepada Tenaga Asing	1089
c. Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pemberian Fasilitas Kerja Sama Teknik Bidang Perpajakan Kepada Mitra Kerja Sama Asing	1097
d. Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pemberian Fasilitas Diplomatik atas Impor/Pembelian Kendaraan Bermotor <i>Completely Build-Up</i> (CBU) untuk Keperluan Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya	1106
e. Standar Pelayanan Administrasi Penugasan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai/Tenaga Indonesia Untuk Tugas Belajar dan Tugas Dinas Lainnya	1122
f. Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pemberian Fasilitas Kerja Sama Teknik Bidang Kepabeanan Kepada Mitra Kerja Sama Asing	1133
g. Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pemberian Fasilitas Kerja Sama Teknik Bidang Kendaraan Kepada Mitra Kerja Sama Asing	1147
5. Biro Umum	
Standar Pelayanan Penanganan Perbaikan/Renovasi/Pengembangan/Pembangunan Gedung Kantor, Rumah Dinas, Wisma, serta Sarana dan Prasarana yang Berada Dalam Penguasaan Kementerian Sekretariat Negara	1178
E. Standar Pelayanan di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan	1188
1. Asisten Deputi Dukungan Kebijakan Dalam Negeri	1188
Standar Pelayanan Analisis Permasalahan dan Pelaksanaan Kebijakan Dalam Negeri.....	1188
2. Asisten Deputi Dukungan Kebijakan Hubungan Internasional	1195
Standar Pelayanan Analisis Permasalahan dan Pelaksanaan Kebijakan Hubungan Internasional	1195



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

3. Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan	1202
a. Standar Pelayanan Penerjemahan Surat-Surat Presiden	1202
b. Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pengangkatan Pejabat Fungsional Penerjemah Melalui Mekanisme Pengangkatan Pertama dan Perpindahan Dari Jabatan Lain	1207
c. Standar Pelayanan Administrasi Pengangkatan dan Penarikan Dubes Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Sahabat, dan Penerimaan Penempatan Dubes Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia	1214
d. Standar Pelayanan Standar Pelayanan Pencatatan Secara Verbatim dan Pendokumentasian Pidato/Pernyataan Presiden Republik Indonesia.....	1225
4. Asisten Deputi Dukungan Data Kebijakan dan Informatika.....	1232
a. Standar Pelayanan Penyajian Data Dukungan Kebijakan Nasional di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	1232
b. Standar Pelayanan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Dukungan Kebijakan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	1239
c. Standar Pelayanan Pembangunan/Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	1247
d. Standar Pelayanan Pengelolaan Sistem Jaringan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	1258
e. Standar Pelayanan Peminjaman dan Pengembalian Koleksi Perpustakaan	1266
f. Standar Pelayanan Pengembangan Bahan Pustaka di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	1276
g. Standar Pelayanan Perawatan Bahan Pustaka.....	1283
F. Standar Pelayanan di Lingkungan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia.....	1289
1. Biro Administrasi Pejabat Negara	1289
a. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Keputusan Presiden tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya	1289
b. Standar Pelayanan Penanganan Administrasi yang Berkaitan Dengan Pemasalahan Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya	1308



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

2. Biro Kepegawaian	1315
a. Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	1315
b. Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	1327
c. Standar Pelayanan Administrasi Pindah Instansi/Alih Status PNS di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	1335
d. Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pengaktifan Kembali PNS Setelah Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara.....	1350
e. Standar Pelayanan Administrasi Pengangkatan Dalam dan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Tertentu PNS di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	1357
f. Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pemberhentian/ Pensiun PNS di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	1378
g. Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Kenaikan Pangkat di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	1390
h. Standar Pelayanan Pengurusan Kartu Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	1409
i. Standar Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pengenal di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	1415
j. Standar Pelayanan Pengurusan Kartu Istri/Suami Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	1420
k. Standar Pelayanan Pengurusan Kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu (Jamkesmen) di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	1426
l. Standar Pelayanan Pengurusan Kartu Askes Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	1434
m. Standar Pelayanan Pengurusan Kartu Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	1440
n. Standar Pelayanan Pengurusan Tunjangan Anak di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	1446
o. Standar Pelayanan Pengurusan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	1451



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

3. Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja	1461
a. Standar Pelayanan Evaluasi, Penyusunan, dan Penyempurnaan Organisasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	1461
b. Standar Pelayanan Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	1476
c. Standar Pelayanan Pelaksanaan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	1490
d. Standar Pelayanan Penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	1502
e. Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	1513
f. Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara	1526
g. Standar Pelayanan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	1537
h. Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Sekretariat Negara.....	1549
i. Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Penetapan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara	1557
j. Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara	1566
G. Standar Pelayanan di Lingkungan Deputi Bidang Hubungan Kelambagaan dan Kemasyarakatan	1576
1. Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural.....	1576
a. Standar Pelayanan Penyiapan Penyelenggaraan Pertemuan Konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan Lembaga Negara...	1576
b. Standar Pelayanan Penyiapan Penyelenggaraan Rapat Kerja, Rapat Pembahasan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara, dan Pembahasan RUU antara Menteri Sekretaris Negara Dengan DPR	1583
c. Standar Pelayanan Pemantauan Kegiatan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural	1591
2. Asisten Deputi Hubungan Lembaga Daerah dan Organisasi Politik.....	1598
a. Standar Pelayanan Penanganan Surat Permohonan dan Penyampaian Aspirasi dari Lembaga Daerah dan Organisasi Politik.....	1598



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

b. Standar Pelayanan Pemantauan Kegiatan Lembaga Daerah dan Organisasi Politik	1608
3. Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat	1616
a. Standar Pelayanan Penanganan Surat Permohonan dan Penyampaian Aspirasi dari Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat kepada Presiden/Menteri Sekretaris Negara	1616
b. Standar Pelayanan Pemantauan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat	1624
4. Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat	1632
a. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	1632
b. Standar Pelayanan Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	1641
H. Standar Pelayanan di Lingkungan Deputi Bidang Perundang-undangan	1649
1. Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian.....	1649
a. Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Bidang Perekonomian	1649
b. Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Inisiatif Pemerintah di Bidang Perekonomian	1656
c. Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat di Bidang Perekonomian	1678
d. Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Bidang Perekonomian	1692
e. Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah di Bidang Perekonomian	1703
f. Standar Pelayanan Penyusunan Pendapat Hukum terhadap Substansi Permasalahan yang Berkaitan dengan Rancangan dan Produk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah di Bidang Perekonomian	1714



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

g.	Standar Pelayanan Pemantauan dan Pelaporan Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah di Bidang Perekonomian	1724
h.	Standar Pelayanan Penyiapan Pertimbangan Menteri Sekretaris Negara terhadap Rancangan Peraturan Presiden di Bidang Perekonomian	1732
i.	Standar Pelayanan Otentifikasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah di Bidang Perekonomian	1739
j.	Standar Pelayanan Evaluasi dan Penyusunan Pendapat Hukum atas Pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah di Bidang Perekonomian	1746
2.	Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat	1753
a.	Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Inisiatif Pemerintah di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.....	1753
b.	Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.....	1778
c.	Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat	1790
d.	Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.....	1801
e.	Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Pertimbangan Rancangan Peraturan Presiden di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.....	1812
f.	Standar Pelayanan Pemantauan dan Pelaporan Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat	1820
g.	Standar Pelayanan Evaluasi dan Penyusunan Pendapat Hukum atas Pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.....	1827



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

h.	Standar Pelayanan Penyusunan Pendapat Hukum terhadap Substansi Permasalahan yang Berkaitan dengan Rancangan dan Produk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.....	1834
3.	Asisten Deputi Hukum	1844
a.	Standar Pelayanan Analisis dan Penyusunan Pendapat Hukum atas Permasalahan Hukum Berkaitan dengan Penanganan Perkara/Gugatan.....	1844
b.	Standar Pelayanan Analisis dan Penyusunan Pendapat Hukum atas Permasalahan Hukum Berkaitan dengan Permohonan Perlindungan Hukum.....	1853
c.	Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional menjadi Undang-Undang	1862
d.	Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Pertimbangan Rancangan Peraturan Presiden Pengesahan Perjanjian Internasional.....	1873
e.	Standar Pelayanan Pemantauan dan Pelaporan Proses Penyusunan RUU dan R Perpres di Bidang Pengesahan Perjanjian Internasional.....	1880
f.	Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Surat Presiden (Amanat Presiden) untuk Pengajuan Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional kepada DPR.....	1886
g.	Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Izin Prakarsa Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional.....	1897
h.	Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Permohonan Ekstradisi.....	1905
i.	Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden tentang Grasi	1913
j.	Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden tentang Amnesti, Abolisi, atau Rehabilitasi ...	1922
k.	Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden tentang Remisi Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara	1933
l.	Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan (Naturalisasi)	1941
m.	Standar Pelayanan Analisis dan Penyusunan Pendapat Hukum atas Permasalahan Hukum Berkaitan dengan Permohonan Prerogatif dan Naturalisasi.....	1956



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

n. Standar Pelayanan Pendistribusian, Publikasi, dan Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan	1966
I. Standar Pelayanan di Lingkungan Inspektorat	1974
1. Standar Pelayanan Audit Kinerja (Operasional) Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	1974
2. Standar Pelayanan Audit Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	1984
3. Standar Pelayanan Reviu Laporan Keuangan pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	1994
J. Standar Pelayanan di Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan	2002
1. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	2002
2. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	2028
3. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	2064